

## Mahulu Bangun Pelabuhan Lintas Nasional



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Kamis, 08/08/2024

**UJOH BILANG, TRIBUN** – Pelabuhan di Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Mahakam Ulu (Mahulu) saat ini memiliki peranan vital sebagai moda transportasi sungai dengan pelayanan penumpang dan barang di daerah terpencil dan terisolasi ini. Namun, sayangnya melihat dari semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan di Mahulu, pelabuhan tersebut dinilai tidak efisien lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu Pemkab melalui Dishub Mahulu tengah gencar melakukan persiapan pembangunan pelabuhan baru di Long Melaham (Lome), Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahulu.

Kadishub Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing mengatakan mengenai *Detail Engineering Design* (DED) atau rancang bangun rincinya telah disetujui. Bahkan tak hanya pelabuhan yang akan dibangun, namun saat ini Pemkab juga telah mendapatkan izin untuk mendirikan bandara.

“Kemarin juga karena ada membentang sungai di sisi landasan udara itu sudah mendapat izin. Bahkan kita dapat rekomendasi untuk dialihkan,” katanya, Senin (5/8/2024). Jadi, Ia menyebut tidak ada masalah lagi mengenai perizinan pembangunannya.

Anggaran pembangunannya telah diajukan kepada pemerintah pusat, untuk pembangunan bandara telah diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan anggaran pembangunan pelabuhan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Anggaran di 2025 - 2026 sudah kita ajukan di Bappenas ya. Pelabuhan Lome ini kan anggaran kemarin dari dana DAK ya,” ujarnya. Dana pembangunan Pelabuhan Lome ini telah diserahkan kepada Dishub pada tahun perencanaan anggaran tahun 2022.

Untuk Pelabuhan Lome ini telah masuk dalam Lintasan Pelabuhan Unit Nasional (LPUN). “Itu sudah masuk kawasan pelabuhan LPUN ya,” sebutnya. Tahun ini, Dishub Mahulu kembali mendapatkan anggaran pembangunan untuk sisi moda transportasi sungai.

Nantinya, jika pembangunan pelabuhan ini masuk dalam LPUN maka akan dikelola oleh provinsi. “Nanti ke depannya kalau dia masuk LPUN dia akan dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi kemungkinan nanti kita bisa bekerja sama dengan provinsi untuk menyerahkan,” tuturnya.

Ia menyebut agar sebuah pelabuhan dapat disebut sebagai pelabuhan LPUN harus memiliki kewenangan syahbandar. **(tar)**

#### **Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Mahulu Bangun Pelabuhan Lintas Nasional, 08/08/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Permenhub 50/2021), pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Diatur dalam Pasal 3 Permenhub 50/2021 bahwa penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
  - b. unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.